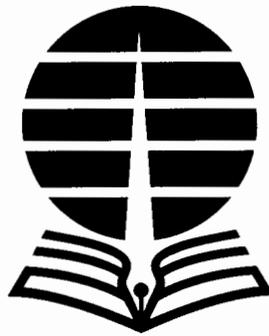


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN
TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AGUNG SURYA HATTA

NIM. 018250542

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Setelah dilakukan penelitian, pengujian validitas pada masing-masing butir pertanyaan, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid, maka layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian. Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa dimensi komunikasi mempunyai koefisien Alpha $0.739 > 0.60$, dimensi sumber daya mempunyai koefisien Alpha $0.678 > 0.60$, dimensi disposisi mempunyai koefisien Alpha $0.665 > 0.60$, dimensi struktur birokrasi mempunyai koefisien Alpha $0.900 > 0.60$, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing dimensi dari kuesioner adalah reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat ukur penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kebijakan masih belum konsisten hal ini seharusnya diperhatikan oleh pembuat kebijakan maupun implementor kebijakan dimana pentingnya konsistensi kebijakan sehingga tidak adanya informasi yang berubah-ubah sehingga tujuan awal dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan formulasi dari pembuatan kebijakan tersebut. Kejelasan kebijakan mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan jawaban responden dimana masih banyak responden yang mengatakan tidak baik. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diasumsikan bahwa kejelasan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan masih harus diperhatikan dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik dalam pelaksanaan kebijakan. Perlu adanya perhatian terhadap cara yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan, hal ini dikarenakan agar tidak adanya lagi pro dan kontra terhadap metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat perlu memperhatikan kejujuran dalam melaksanakan kebijakan karena hal ini sangat penting bagi kelompok sasaran agar tidak adanya kecurangan dalam menjalankan kebijakan sehingga kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan dan Sasarannya

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the implementation of the Urban Poverty Policy (P2KP) in Tanjung Unggat District of Bukit Bestari Tanjungpinang.

After doing research, testing the validity of each of the questions, if r count > r table it can be concluded that all statements declared invalid, it is feasible to be used as a research instrument. Reliability testing showed that the dimension of communication has a coefficient Alpha 0739 > 0.60, the dimensions of the resource has a coefficient Alpha 0678 > 0.60, dimensional disposition has a coefficient Alpha 0665 > 0.60, the dimensions of the bureaucratic structure has a coefficient of Alpha 0.900 > 0.60, so we can say all measurement concepts respectively the dimensions of the questionnaire is reliable so that used as a measuring tool research

Based on the analysis of data and discussion is done it can be seen that the policy is still not consistently this should be considered by policy makers and implementor of policies in which the importance of consistent policy so that no information is changing so that the original purpose of the implementation of these policies can work well and in accordance with the formulation of the policy making. Clarity of policy on Urban Poverty did not run well this is evidenced by the respondents which many respondents had to say was not good. Based on respondents' answers can be assumed that clear policy Urban Poverty still must be considered where it is certainly going to have an impact that is not good policy implementation. The need for attention to the means used to implement the policy, this is because that no longer pros and cons of the methods used in the implementation of the policy. In implementing the policy of Urban Poverty, especially in Tanjung Unggat need to pay attention to fairness in carrying out the policy because it is very important for the target group so that no fraud in a policy so that the policy can be effective in accordance with its goals and objectives

Keywords: Policy Implementation, Urban Poverty Program

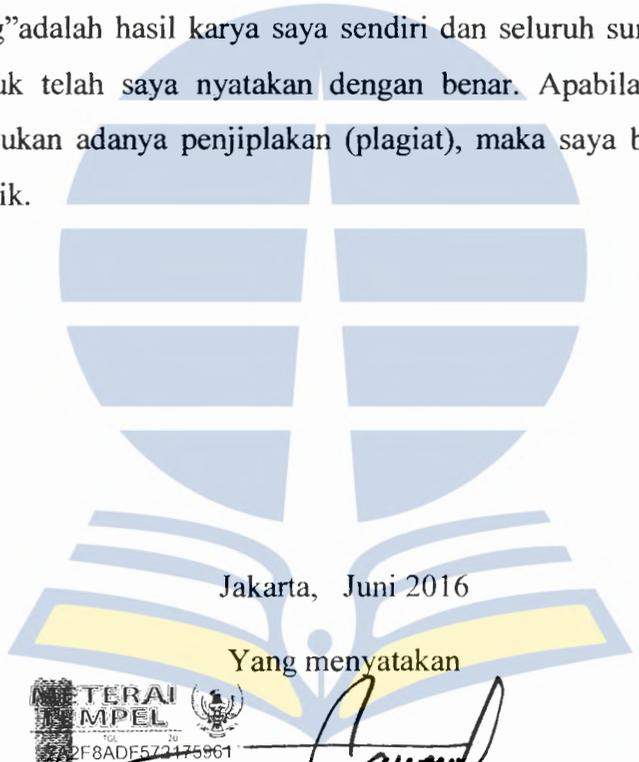
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juni 2016

Yang menyatakan

AGUNG SURYA HATTA

NIM : 018250542

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAMP : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Tanjung Unggat
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Penyusun TAMP : Agung Surya Hatta

NIM : 018250542

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/ Tanggal :

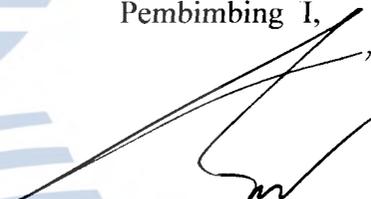
Menyetujui,

Pembimbing II



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

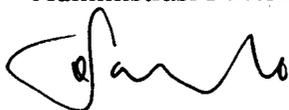
Pembimbing I,



Dr. H. Syafrial Evi MS, S.Sos, MM
NIP. 19561229 198503 1 006

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Program Magister
Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Agung Surya Hatta
Nim : 018250542
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) Di Kelurahan Tanjung Unggat
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program
Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

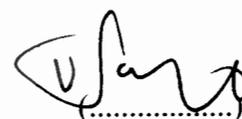
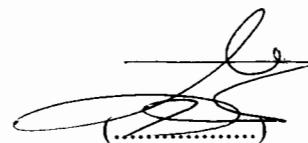
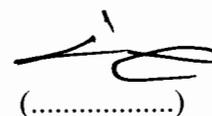
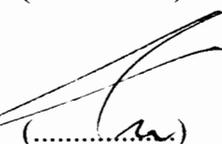
KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli : Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D

Pembimbing II : Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D

Pembimbing I : Dr. H. Syafrial Evi MS, S.Sos, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”**. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai belah pihak, maka penulisan Tugas Akhir Program Magister ini tidak akan selesai sebagaimana yang seharusnya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Terbuka Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed.,Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Kepala UPBJJ-UT Batam Bapak Drh.Ismed Sawir,M.Sc
4. Pembimbing I Prof.Daryono,S.H.,M.A., Ph.D, dan Pembimbing II Dr.H.Syafrial Evi MS,S.Sos,MM, dalam penulisan TAPM, beliau telah memberikan waktu, tenaga, arahan, dan memotivasi kepada penulis dalam penyelesaian TAPM ini.
5. Seluruh Dosen TTM (Tutorial Tatap Muka) dan Dosen TUTON (Tutorial Online) program Magister Sains Universitas Terbuka.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Terbuka Batam yang telah banyak membantu.

7. Kedua Orang Tua tersayang Alm.H.dr.Bachtiar Ismail dan Hj.Darmayanti.
8. Istri dan Anak-anak tercinta, Nina Nurani, Amd, Farell Surya Wibawa dan Farhan Surya Anugrah yang selalu setia dan berkorban kepada penulis dalam menyelesaikan TAPM ini.
9. Rekan-rekan serta pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir Program Magister ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik maupun bimbingan agar penulisan yang akan datang dapat lebih sempurna sesuai yang diharapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir Program Magister ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Tanjungpinang, Juni 2016
Penulis



AGUNG SURYA HATTA
NIM : 018250742

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Implementasi Kebijakan.....	9
2. Kebijakan	18
3. Kemiskinan	23
B. Kerangka Berfikir.....	39
C. Definisi Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Desain Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Instrumen Penelitian	43
D. Prosedur Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	44
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
B. Gambaran Umum Responden	50
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	51
C. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	52
1. Uji Validitas	52
2. Uji Reliabilitas	53

D. Hasil Penelitian	54
1. Komunikasi	54
2. Sumber Daya	58
3. Disposisi	63
4. Struktur Birokrasi	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Persebaran Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang 2014.....	4
Tabel 1.2. Persebaran Penduduk Miskin Kecamatan Bukit Bestari 2014.....	4
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	51
Tabel 4.3. Pengujian Validitas Variabel Penelitian.....	52
Tabel 4.4. Pengujian Reliabilitas Dimensi Variabel	53
Tabel 4.5. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Transmisi Kebijakan .	55
Tabel 4.6. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Kejelasan.....	56
Tabel 4.7. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Konsistensi	57
Tabel 4.8. Frekwensi Jawaban Responden Sumber Daya Manusia.....	59
Tabel 4.9. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Finansial.....	60
Tabel 4.10. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Metode	62
Tabel 4.11. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Komitmen	64
Tabel 4.12. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Kejujuran.....	65
Tabel 4.13. Frekwensi Jawaban Responden Sifat Demokratis	66
Tabel 4.14. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Komunikatif	67
Tabel 4.15. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Indikator Cerdik	68
Tabel 4.16. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Fragmentasi.....	70
Tabel 4.17. Frekwensi Jawaban Responden Mengenai SOP	71

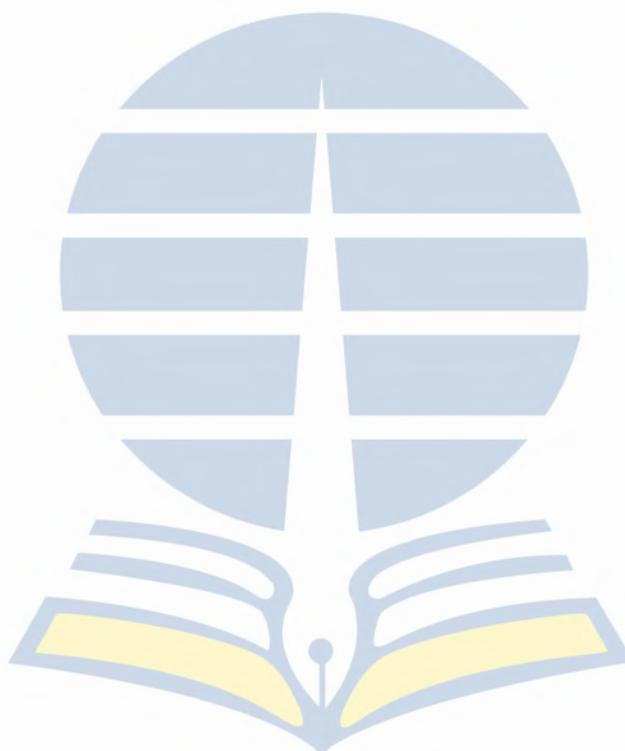
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1. Normalitas Data Dimensi Komunikasi	54
Gambar 4.2. Normalitas Data Dimensi Sumber Daya	58
Gambar 4.3. Normalitas Data Dimensi Disposisi	63
Gambar 4.4. Normalitas Data Dimensi Struktur Birokrasi	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Kuisisioner Penelitian
Lampiran II. Tabel Induk
Lampiran III. Tabel Frekwensi
Lampiran IV. Tabel Normalitas



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh berbagai permasalahan seperti antara lain rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari

perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:3-4).

Banyak program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Selanjutnya disingkat P2KP). P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban). P2KP sebagai suatu proyek merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai investasi modal sosial (*social capital*) menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Sehingga penanggulangan kemiskinan akan menjadi suatu gerakan masyarakat yang lebih menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, dibandingkan bila dilakukan hanya oleh pemerintah atau pihak di luar masyarakat.

Pemerintah bersama masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, tentu saja dituntut kapasitas dan kapabilitas yang mendukung. Dalam hal inilah peran pemerintah, salah satunya melalui P2KP, berupaya untuk mendorong proses pengembangan atau pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat (*community empowerment*) agar mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tersebut sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan proses transformasi sosial di masyarakat miskin.

P2KP menerapkan pendekatan melalui pengokohan kelembagaan masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat tercipta wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Yang pada akhirnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Kelembagaan masyarakat yang bersifat lokal diharapkan menjadi motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktifitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kemiskinan telah menjadi masalah sosial yang pelik yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang pada tahun 2014 penduduk miskin di Kota Tanjungpinang berjumlah 49.750 ribu jiwa atau 22,3% dari keseluruhan penduduk Kota

gTanjungpinang 230.380 jiwa. Secara rinci persebaran penduduk miskin di Kota Tanjungpinang dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1
Persebaran Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang 2014

No	Kecamatan	Penduduk Miskin
1	Kecamatan Tanjungpinang Kota	10.109
2	Kecamatan Tanjungpinang Barat	10.111
3	Kecamatan Bukit Bestari	18.320
4	Kecamatan Tanjungpinang Timur	11.210
	Jumlah	49.750

Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa secara kuantitas, Kecamatan Bukit Bestari menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 18.320 jiwa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu Kelurahan yang secara administratif kewilayahan berada pada Kecamatan Bukit Bestari Adapun secara khusus persebaran penduduk miskin di wilayah Kecamatan Bukit Bestari dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Persebaran Penduduk Miskin di Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2014

No	Kelurahan	Penduduk Miskin
1	Kelurahan Tanjung Unggat	6.002
2	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	4.590
3	Kelurahan sungai Jang	3.222
4	Kelurahan Dompok	2.021
5	Kelurahan Tanjung Pinang Timur	2.485
	Jumlah	18.320

Sumber : Tanjungpinang Dalam Angka 2014

Seperti pada tabel di atas bahwa Kelurahan Tanjung Unggat merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Bukit Bestari pada tahun 2014. Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut maka pemerintah daerah memiliki banyak program. Salah satunya adalah program P2KP. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah terus menggalakkan program upaya penanggulangan kemiskinan berskala nasional. Salah satunya melalui kebijakan pemerintah tahun 2015

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama dan Pemerintah provinsi kepulauan Riau serta khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan. Namun hingga saat ini tingkat kemiskinan semakin meningkat khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat yang berdampak pada ketidaklayakan tempat tinggal dan lingkungan.

Di Kelurahan Tanjung Unggat jika dilihat fakta bahwa memang masih banyak terdapat masyarakat miskin, mulai dari segi infrastruktur seperti lingkungan yang tidak memadai dan cenderung kumuh, kemudian banyaknya rumah tidak layak huni di daerah ini menjadi salah satu ukuran kemiskinan di kelurahan ini, tidak hanya itu rata-rata pekerjaan di Kelurahan ini adalah nelayan, buruh dan banyaknya pengangguran mengakibatkan angka kemiskinan di daerah ini lebih tinggi dari pada 4 kelurahan di Kecamatan Bukit Bestari.

Kondisi sosial juga menunjukkan bahwa kelurahan ini memang selayaknya mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, karena Rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Dari 16.083 jiwa penduduk Kelurahan Tanjung Unggat tercatat sekitar 11.835 jiwa yang berpendidikan di bawah SLTA. Tidak tersedianya industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tingginya jumlah keluarga pra sejahtera. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana infrastruktur hingga menghambat pengembangan potensi perekonomian masyarakat pesisir. Kurang tersedianya lahan pertanian yang baik, hingga penduduk tidak memiliki alternatif mata pencaharian selain menjadi buruh nelayan atau nelayan tradisional.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul penelitian yaitu : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

B. Perumusan Masalah

Kebijakan dan Program pengentasan kemiskinan yang diterapkan belum menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan dan terus saja mengalami perubahan dalam pengentasan kemiskinan target dan tujuan pengimplementasian program pengentasan kemiskinan masih dianggap kurang berjalan dengan baik dalam rangka tujuan dan target untuk penanganan kemiskinan.

Di samping itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, banyak menemui kendala terutama pada tataran implementasinya. Maka dalam hal ini penulis mencoba menarik perumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?

C. Tujuan penelitian.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama dan Pemerintah provinsi kepulauan Riau serta khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

D. Kegunaan penelitian.

Diantaranya, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis : Untuk mencari pengetahuan ilmiah dalam dalam pengentasan kemiskinan serta untuk melihat relevansi teori-teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Kegunaan Praktis : Manfaat dari penulisan ini dapat sebagai masukan dalam usaha mengetahui produk kebijakan publik khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, sebagai masukan baru dan sumbangan untuk pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Institusi lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan pengembangan studi tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang.
- c. Kegunaan Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan peneliti, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan kajian kebijakan pengentasan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir”.

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Pendapat lain dikemukakan oleh Dunn (2000:109) menjabarkan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih hubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dll.

Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Penerapan suatu kebijakan publik akan melibatkan beraneka macam kegiatan seperti menyampaikan, menekankan pengarahannya, mengeluarkan dana, pembentukan suatu organisasi, struktur birokrasi pemerintahan, bahkan melibatkan daerah atau negara lain. Hal ini sesuai seperti yang dikemukakan Edward III (1980:2) bahwa implementasi kebijakan publik dapat mencakup sekumpulan tindakan yang luas yaitu menetapkan dan mengimplementasikan instruksi-instruksi, menentukan dana, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian, mengumpulkan data, mengerahkan informasi, menganalisa masalah unit-unit organisasi, menentukan alternatif, merencanakan masa yang akan datang dan bermusyawarah dengan rakyat, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan aktivitas bisnis dengan komisi legislatif, unit birokrasi, serta bahkan negara lain.

Sejalan dengan definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan jelasalah bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah pihak pemerintah, kelompok, dan individu-individu yang berkepentingan yang ada dalam masyarakat, dimana kebijakan itu diterapkan lebih lanjut oleh Edward III yang mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel dan faktor dan variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, menurut Edwards III (Subarsono 2008:90-92) ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (*kejelasan*); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan

kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor

dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa :

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program

yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”

Secara khusus Wahab (2001:5-10) mengemukakan tentang ciri-ciri yang melekat pada kebijakan yaitu:

- a. “Kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik seperti ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarkhie, dan sebagainya.
- b. Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan melalui tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang.
- c. Kebijakan itu hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu tapi juga diikuti dengan keputusan-

keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya

- d. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu baik berbentuk positif atau negatif”.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidaklah ada artinya jika tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijaksanaan itu haruslah berhasil. Malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan yang akan terkandung dalam kebijaksanaan itu haruslah tercapai. Menurut Agustino (2006:185) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal, tidak membuahkan hasil, karena antara lain :

- a. Teori yang menjadi dasar itu tidak tepat. Dalam hal ini demikian, maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif

- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia)

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu, dapatlah diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut sudah harus diperhatikan dan diperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefenisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2008:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang dikutipnya dari pendapat Graycar, dimana menurutnya bahwa public policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan

sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah / pegawai. Menurut Abidin (Syafarudin 2008:75) menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Definisi lain dijelaskan oleh Gamage dan Pang (Syafarudin 2008:75) "Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy (Syafarudin 2008:76) "Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Menurut Syafarudin (2008:78) kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat mematuhi. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan *public* adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan (*adapted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public interest*).

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah

publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukakn oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Menurut Merilee S. Grindle (Nugroho 2003:174) isi dari kebijakan mencakup :

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. derajat perubahan yang diinginkan ,
4. kedudukan pembuat kebijakan,
5. (siapa) pelaksana program,
6. Sumberdaya yang dikerahkan,

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. karakteristik lembaga dan penguasa
3. kepatuhan dan daya tanggap

Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi. Sedangkan menurut Friedich (Agustino:2006:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Jenis-Jenis Kebijakan Jenis kebijakan publik menurut James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. *Substantive and Procedural Policies*. *Substantive Policy* adalah Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural Policy* Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*).
2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*. *Distributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. *Redistributive Policy* adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan,

pemilikan, atau hak-hak. *Regulatory Policy* yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

3. *Material Policy*. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
4. *Public Goods and Private Goods Policies*. *Public Goods Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang. *Private Goods Policy* yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi menurut Widodo (2013:43) yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri.

3. Kemiskinan

Kemiskinan dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya (abdulsyani,2002 : 190). Sedangkan kemiskinan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos RI) adalah kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk memepertahankan dan menyambungkan kehidupan yang bermatabat.

Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan.Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,

2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4).

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya *multidimensional*. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (World Bank, 2000).

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: 136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.

Kemiskinan sumber daya ekonomi melihat fenomena kemiskinan dari sisi ketiadaan atau kelangkaan sumber daya ekonomi baik faktor-faktor produksi yang

berupa modal, tanah, sumber daya manusia dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin. Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan .

Ukuran lain kemiskinan dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang menggunakan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Dalam ukuran ini, sebuah keluarga disebut miskin jika: (i) tidak bisa melaksanakan kewajiban rutin dalam agamanya; (ii) tidak bisa makan dua kali dalam sehari; (iii) tidak mempunyai pakaian lain untuk bekerja/bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya; (iv) tinggal di rumah yang sebagian besar ruangnya berlantai tanah; (v) tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah di atasi daripada dua gambaran yang lainnya.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat di atasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian

apabila institusi tempatnya bekerja melarang (Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>)

Maxwell (2007:12) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran social, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya kelanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relative (relative deprivation)

Agus salim (2000:18) dalam bukunya "mereduksi kemiskinan" menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dapat dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut. Dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005:5). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun (dalam Suryawati 2005:10), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
6. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.

7. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. *Exploitatif intrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Inetrnal political fragmentation and civil stratife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Sen dalam Ackerman (2000: 154-155) berpendapat bahwa kapabilitas untuk dapat berfungsi (*capabilities to function*) adalah yang paling menentukan status miskin atau tidaknya seseorang. Selanjutnya menurut Sen pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati. Dengan demikian tingkat kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti pemahaman konvensional; yang paling penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari barang-barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan barang-barang tersebut.

Kemudian Dilihat dari segi penyebabnya (Baswir :1997) kemiskinan dapat dibagi menjadi.

- a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya menadapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam

- b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Kemiskinan memiliki sifat plural sehingga kemiskinan menunjukkan adanya sekelompok orang yang serba kekurangan. Masyarakat subsisten yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tapi rendah, bisa jadi tidak merasa miskin karena mereka merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena gaya hidup hedonis yang mereka jalani, atau lingkungan budaya tidak sehat yang mereka hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba ataupun judi). Dalam hal ini meski kelihatannya mereka berkecukupan, namun apabila selalu merasa kekurangan, mereka bisa dikatakan miskin (Sulistiyanti, 2009). Menurut SMERU (2001), kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil) (Suharto, dkk, 2004:7-8).

Definisi Kemiskinan dibedakan menjadi:

- a. Kemiskinan absolut. Seseorang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup minimum/KHM (Minimum Living Standard), antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena alami / natural.

- b. Kemiskinan Struktural atau kemiskinan relatif. Adalah pendapatan seorang yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.
- c. Kemiskinan cultural. Mengacu pada sikap seorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada upaya pihak luar untuk membantunya

Kemiskinan relatif ditentukan lebih berdasarkan pada satu persentase tertentu yang dijadikan batas antara miskin dan tidak miskin. Misalnya ditetapkan bahwa sepuluh persen masyarakat berpendapatan terendah merupakan masyarakat miskin. Konsep kemiskinan relatif akan sangat bermanfaat dalam usaha redistribusikan kembali pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok yang

dikategorikan secara relatif sebagai kelompok miskin. Berbeda dari kemiskinan relatif, kemiskinan mutlak didasarkan pada patokan tertentu, sering disebut garis kemiskinan. Setiap orang yang hidup di bawah garis kemiskinan akan dianggap sebagai orang miskin. Dengan cara ini bisa diketahui berapa persen dari penduduk suatu daerah atau negara ataupun di dunia yang hidup dalam kemiskinan.

Sekalipun kemiskinan jenis kedua disebut kemiskinan absolut, namun penggunaan garis kemiskinan tertentu akan senantiasa menimbulkan perdebatan tentang kemutlakannya. Karena kemutlakan ini bisa diperdebatkan maka ini berarti bahwa garis kemiskinan yang dipergunakan pun bersifat relatif. Relativitas garis kemiskinan bisa datang dari subyektivitas peneliti atau penggunaanya bisa juga datang dari lingkungan masyarakat yang diteliti. Karena itulah kita mengenal berbagai macam garis kemiskinan dengan berbagai macam paket kandungan yang dijadikan tuntutan minimal untuk bisa dikatakan hidup sebagai orang yang tidak miskin.

Terlepas dari perdebatan soal kemiskinan relatif dan kerelatifan dari garis kemiskinan absolut, tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah gejala yang bisa dilihat dan diukur. Untuk mengukurnya, seperti penelitian-penelitian kemiskinan pada umumnya di negara-negara berkembang, kita akan menggunakan konsep kemiskinan absolut. Sampai batas tertentu kita bisa mengukur kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomis. Ketidakmampuan ini bisa diukur dengan meneliti kondisi umum yang melingkupi seseorang atau sekelompok orang, kondisi kesehatan dan fasilitasnya, kondisi pendidikan dan

fasilitasnya, dan tentu saja keadaan pendapatan serta pengeluarannya. Kemiskinan merupakan konsep yang bersifat multidimensi, sehingga penelitian mengenai kemiskinan di suatu negara atau daerah dapat dilihat dari beberapa pendekatan. UNESCAP (2004) membagi kemiskinan dari beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan moneter (*monetary approach*). Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengukur kemiskinan selama ini adalah pendekatan moneter. Menurut pendekatan ini, garis kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat pendapatan tertentu yang cukup untuk membeli kebutuhan hidup minimal. Garis kemiskinan diukur dengan menghitung pengeluaran untuk membeli makanan dan bukan makanan. Jika pendapatan/pengeluaran seseorang lebih rendah dari tingkat minimal yang ditentukan, maka orang tersebut dianggap miskin. Kelemahan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini tidak memasukkan kemudahan terhadap fasilitas sosial, yang sesungguhnya mempengaruhi kemakmuran seseorang.
- b. Pendekatan kemampuan (*capabilities approach*). Pendekatan ini menekankan bahwa pendapatan itu akan berguna jika meningkatkan kemampuan masing-masing individu dan membuat individu itu menjadi lebih berguna bagi masyarakat. Kemampuan individu yang dimaksud adalah hidup lebih lama, membaca, menulis, berhitung, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan pendekatan itu, seseorang dianggap miskin jika ia memiliki

kemampuan di bawah minimal untuk melakukan hal-hal tersebut. Pendapatn yang diperlukan oleh seseorang untuk mencapai kemampuan tersebut bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan demikian, orang yang *capability-poor* mungkin bukan orang yang pendapatannya rendah (*income-poor*). Karena sulitnya mengukur kemampuan (*capabilities*) tersebut, dalam praktek, ukuran yang digunakan adalah tingkat melek huruf dan tingkat harapan hidup.

- c. Pendekatan pengecualian social (*social exclusion approach*). Pendekatan ini menekankan pada hubungan antar individual. Pengecualian sosial terjadi ketika individu atau kelompok penduduk tidak mampu berpartisipasi secara aktif di lingkungan tempat mereka hidup. Social exclusion biasanya adalah kelompok, misalnya adalah wanita, orang berusia lanjut, cacat, atau kelompok etnik tertentu. Aspek yang penting dalam pendekatan ini terutama pada proses yang mengakibatkan pengecualian sosial tersebut.
- d. Pendekatan partisipasi (*participatory approach*). Pendekatan partisipasi melihat kemiskinan dari sisi yang agak berbeda. Kemiskinan dilihat dari sisi orang miskin itu sendiri. Dengan demikian definisi kemiskinan tidak dibuat oleh orang lain melainkan oleh orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah miskin. Dimensi kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Karena

kemiskinan bisa dilihat dari banyak sisi, maka pendekatan ini sulit dikuantifikasikan.

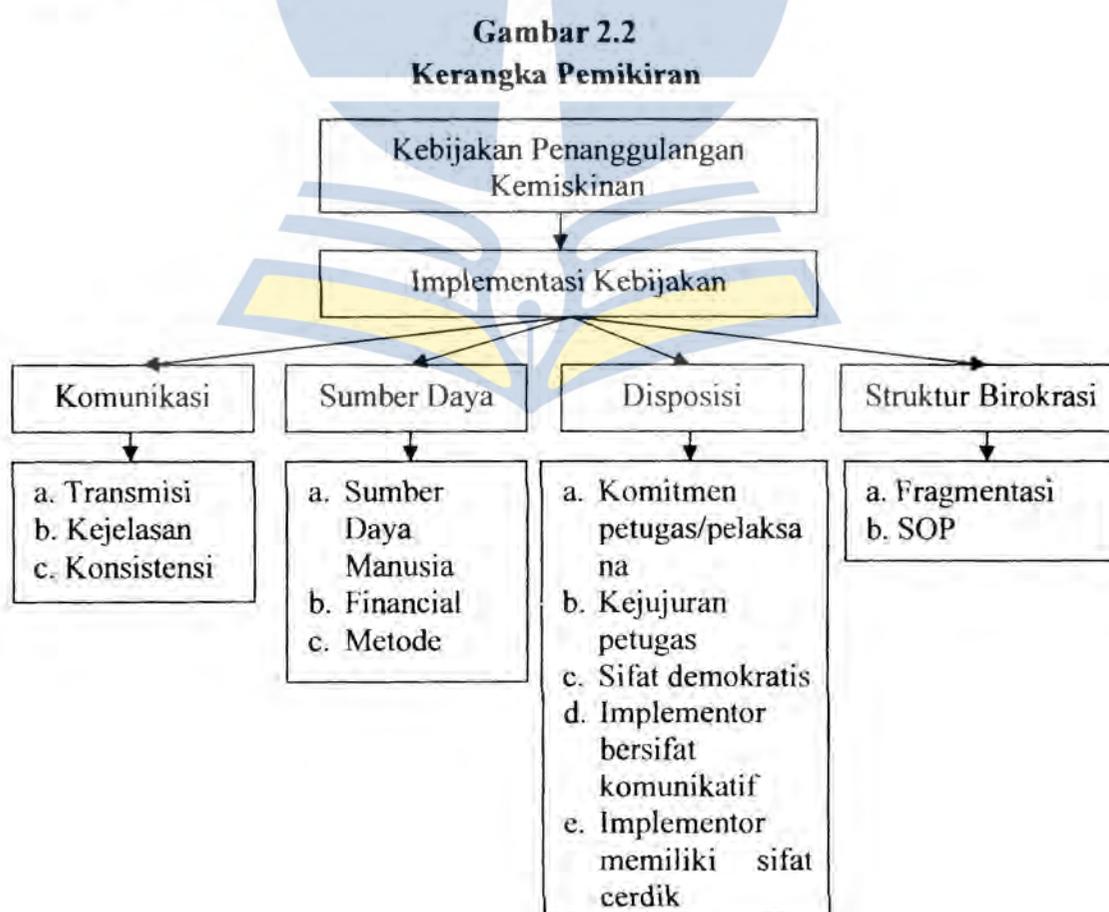
Secara teoritis, garis kemiskinan dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan produksi (production approach). Hanya dapat menggambarkan kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup. Pendekatan pendapatan (income approach). Ini yang paling baik, tetapi data pendapatan rumah tangga tidak mudah dikumpulkan di lapangan. Pendekatan pengeluaran (expenditure approach). Tingkat pengeluaran digunakan sebagai proxy pendapatan rumah tangga.

Berkaitan dengan peran pemerintah, setidaknya ada dua hal yang bisa kita soroti. Hal pertama berkaitan dengan pengaruh kebijakan pemerintah pada kemiskinan yang ada, baik kebijakan langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan kemiskinan. Kebijakan penyediaan infrastruktur yang menciptakan kesempatan kerja, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan sebagainya termasuk di dalamnya. Pengertian kemiskinan menurut pendekatan kebutuhan dasar: suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri dan kemartabatan, terbentur pada ketergantungan, terpaksa menerima perlakuan kasar dan hinaan, serta tidak diperdulikan. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan dimana dalam suatu masyarakat ditemukan situasi a lack of access to resources, productive assets and income resulting in state of material deprivation (Nilufer, 1998). Intinya kekurangan sumberdaya, aset produktif dan pendapatan yang layak mengakibatkan hadirnya keadaan serba kekurangan pada individu atau pun rumah tangga.

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan konsep teori diatas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini perlu ada batasan penelitian atau definisi konsep dalam variabel menurut Edwards III (Subarsono 2008:90-92) ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan mensyaratkan agar pemerintah mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) seperti para dinas yang terkait lebih memahami. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Adanya transmisi yaitu adanya saluran yang baik guna kelancaran pelaksanaan kebijakan
- b. Kejelasan yaitu implementor merasa jelas dengan kebijakan yang dibuat
- c. Konsistensi yaitu kebijakan yang dikomunikasikan bersifat tetap

b. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi para pegawai dan sumber daya finansial, sumber daya adalah faktor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Sumber daya manusia yaitu adanya pegawai yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan

- b. Finansial yaitu adanya dana dalam menjalankan kebijakan
- c. Metode yaitu cara yang ditempuh agar kebijakan dapat berjalan.

c. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Hal ini dapat dilihat dari indikator:

- a. Komitmen petugas/pelaksana dalam menjalankan kebijakan
- b. Kejujuran petugas dalam menjalankan kebijakan.
- c. Sifat demokratis yang dimiliki oleh pelaksana.
- d. Pelaksanan atau implementor bersifat komunikatif dalam menjalankan kebijakan ini
- e. Pelaksana atau implementor harus memiliki sifat cerdas agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Adanya fragmentasi atau pembagian tugas antara instansi terkait.
- b. Adanya SOP dalam menjalankan kebijakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian metode penelitian memiliki peranan penting mulai dari pengumpulan data yang sesuai hingga dilakukannya analisa data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang alami atau fenomena buatan manusia bentuk (Sukmadinata: 2006).

Furchan (2004) menjelaskan bahwa penelitian deskripsi adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus didukung survei.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari yang berjumlah 6.002 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel yaitu *Purposive Sampling*. Definisi *sampling purposive* menurut Sugiyono (2011:68), adalah sebagai berikut: “*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang mendapat bantuan dalam program P2KP di Kelurahan Tanjung Unggat tahun 2015. Dimana pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 67 responden.

C. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui yaitu dengan metode penyebaran angket kepada responden kepada Implementor kebijakan sehingga nantinya dapat memberikan jawaban yang akurat terhadap penelitian ini.

D. Prosedur pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data relevan yang menunjang tercapainya tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuisisioner (*questionnaire*)

Berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang yang menjadi responden dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan dari metode kuisisioner ini akan menjadi data primer dan yang dihasilkan dari teknik pengumpulan data yang lain akan menjadi informasi tambahan.

2. Dokumentasi atau Kepustakaan

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen berupa data deskripsi kemiskinan di Kota Tanjungpinang dan data praktis dari perpustakaan sehubungan dengan judul atau pokok bahasan yang diteliti dalam penelitian ini.

E. Metode Analisa Data

Metode analisis data sangat berperan penting dalam suatu proses penelitian yang digunakan untuk mengelola, menguji, dan menginterpretasikan data yang berbentuk angka-angka secara kongkrit. Dalam menjawab penelitian ini metode analisa data yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS sebagai alat hitung frekwensi jawaban responden serta beberapa pengujian instrument penelitian sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan perkataan

lain, instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Correlated Item-Total Correlation* pada setiap butir pertanyaan dengan nilai *r* tabel. Jika nilai *Correlated Item-Total Correlation* (*r* hitung) > nilai *r* tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian valid (Ghozali, 2005). Untuk melakukan pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *software Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 21.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Ghozali (2005) menyatakan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Repeated measure* atau pengukuran ulang dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner (pertanyaan) yang sama pada waktu yang

berbeda, dan kemudian dilihat apakah responden tetap konsisten dengan jawabannya.

2. *One shot* atau pengukuran sekali saja dilakukan dengan cara hanya sekali saja kuisioner diberikan kepada responden dan kemudian hasilnya dibandingkan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Pengujian reliabilitas kuisioner dalam penelitian ini menggunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja dan pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Untuk melakukan pengujian reliabilitas kuisioner dilakukan dengan menggunakan *software Staistical Package for Social Science (SPSS) versi 21*. Instrumen dapat dikatakan andal (*reliable*) bila memiliki koefisien keadaan realibilitas sebesar 0,6 atau lebih. Bila alpha lebih kecil dari 0.6, maka ditanyakan tidak *reliable* dan sebaiknya dinyatakan *reliable*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan

memberikan gambaran penelitian. Terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner, selanjutnya dipastikan jawaban responden berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Dari data tersebut, dilakukan analisis deskriptif melalui perhitungan persentase dan sistem skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian urusan Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan Publik dari Walikota Tanjungpinang kepada Lurah dan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 676 Tahun 2009 tentang Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan Publik dari Walikota Tanjungpinang kepada Lurah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tersebut, maka Tanjungpinang yang merupakan sebuah Kota memiliki Kelurahan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Pemerintah Kota Tanjungpinang terbagi dalam 4 (empat) Kecamatan yaitu : Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari.

Kelurahan Tanjung Unggat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan di wilayah Kota Tanjungpinang. Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan Bukit Bestari yang terdiri dari 9 (sembilan) Rukun Warga dan 43 (empat puluh tiga) Rukun Tetangga dengan luas wilayah mencapai 10.50 KM².

Kelurahan Tanjung Unggat memiliki luas wilayah 10.50 KM² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bugis. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungpinang Timur. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kampung Bulang. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kamboja. Kelurahan Tanjung Unggat memiliki fisiografis yang terdiri dari 83% dataran rendah dan 17% lautan. Dan dikarenakan letak geografis berada pada wilayah garis khatulistiwa, Kelurahan Tanjung Unggat memiliki 2 (dua) musim yakni musim kemarau (antara April s/d September) dan musim penghujan (antara Oktober s/d Maret) setiap tahunnya. Kelurahan Tanjung Unggat melalui topografi merupakan dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 2 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 114 hari sebanyak 2000-3000 mm/tahun dengan suhu berkisar 30°C sampai 32°C. Tekanan udara terendah 1.0102 MBS dan tertinggi 1.01037 MBS serta kelembaban udara rata-rata antara 61.5°C sampai dengan 91.5°C.

B. Gambaran Umum Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisis lebih lanjut tentang pelaksanaan kebijakan, maka pada sub bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik responden. Selanjutnya untuk memastikan fakta atau memperkuat kepercayaan dalam rangka kebenaran yang objektif, digunakan angket dengan responden. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan hasil pengolahan data sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Frekwensi (Orang)
1.	Laki-laki	32
2.	Perempuan	35
	Jumlah	67

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2015

Dari data yang tampak pada pemaparan pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 35 orang merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekwensi (Orang)
1.	21 Tahun s/d 30 Tahun	7
2.	31 Tahun s/d 40 Tahun	22
3.	> 40 Tahun	38
	Jumlah	67

Sumber data: Hasil olahan kuisisioner, 2015

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden terbanyak yaitu memiliki umur diatas 40 tahun yang berjumlah 38 orang sedangkan yang berumur 21 sampai dengan 30 tahun berjumlah 7 orang dan yang berumur 31 sampai dengan 40 tahun berjumlah 22 orang.

C. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah *instrumen* alat ukur telah menjalankan fungsi dan ukurannya. Menurut Sekaran (2003) validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan *instrumen* dilakukan uji validitas dengan menggunakan *korelasi product moment pearson*. Menurut Sugiono (2010) *instrument* yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti *instrument* tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk signifikansi 5% dari *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2006)

Tabel 4.3
Pengujian Validitas Variabel Penelitian

Dimensi	Item Pernyataan	r hitung	r table N = 67	Keterangan
Komunikasi	Q1	0,606	0,237	VALID
	Q2	0,703	0,237	VALID
	Q3	0,681	0,237	VALID
Sumber Daya	Q4	0,611	0,237	VALID
	Q5	0,487	0,237	VALID

	Q6	0,666	0,237	VALID
Disposisi	Q7	0,622	0,237	VALID
	Q8	0,368	0,237	VALID
	Q9	0,582	0,237	VALID
	Q10	0,455	0,237	VALID
	Q11	0,524	0,237	VALID
Struktur Birokrasi	Q12	0,896	0,237	VALID
	Q13	0,940	0,237	VALID

Sumber : Data Olahan 2015

Berdasarkan Tabel 4.3 pengujian validitas pada masing-masing butir pertanyaan , jika r hitung $>$ r tabel dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, maka layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.60 (Ghozali 2005 dalam Nunally 1967)

Tabel 4.4
Pengujian Reliabilitas Dimensi Variabel

Variabel	Alpha Hitung	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Komunikasi	0.739	0.60	Reliabel
Sumber Daya	0.678	0.60	Reliabel
Disposisi	0.665	0.60	Reliabel
Struktur Birokrasi	0.900	0.60	Reliabel

Sumber : Olahan Data 2015

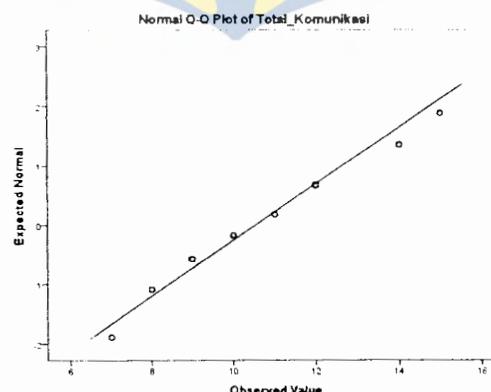
Berdasarkan Tabel 4.4 hasil pengujian reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa dimensi komunikasi mempunyai koefisien Alpha $0.739 > 0.60$, dimensi sumber daya mempunyai koefisien Alpha $0.678 > 0.60$, dimensi disposisi mempunyai koefisien Alpha $0.665 > 0.60$, dimensi struktur birokrasi mempunyai koefisien Alpha $0.900 > 0.60$, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing dimensi dari kuesioner adalah reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

D. Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal berikut dapat dilihat hasil pengujian normalitas data untuk dimensi komunikasi :

Gambar 4.1
Normalitas Data Dimensi Komunikasi



Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 21

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dari grafik Q-Q Plot yang menunjukkan normalitas data dimensi komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Selanjutnya dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator dari dimensi komunikasi sebagai berikut :

a. Transmisi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan dapat diketahui bahwa implementor kebijakan selalu menyediakan saluran agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Saluran yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan ini dimana kebijakan dapat di informasikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan maupun yang merasakan dampak kebijakan dalam hal ini transmisi kebijakan yang ingin dilihat yaitu kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kota Tanjungpinang. berikut tanggapan responden mengenai indikator transmisi kebijakan.

Tabel 4.5
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Transmisi Kebijakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	10	14.9	14.9	14.9
4.00	36	53.7	53.7	68.7
5.00	21	31.3	31.3	100.0
Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terbanyak yaitu dengan jawaban baik dengan jumlah 36 responden. Hal ini

menunjukkan baiknya transmisi yang dilakukan oleh implemendor dalam melaksanakan kebijakan.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan baik itu dari kejelasan isi maupun dalam pelaksanaannya. Berikut tanggapan responden mengenai indikator transmisi kebijakan.

Tabel 4.6
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Kejelasan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	10.4	10.4	10.4
2.00	19	28.4	28.4	38.8
3.00	9	13.4	13.4	52.2
4.00	22	32.8	32.8	85.1
5.00	10	14.9	14.9	100.0
Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan tabel frekwensi jawaban mengenai kejelasan kebijakan diatas dapat diketahui bahwa kejelasan kebijakan mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan jawaban responden dimana masih banyak responden yang mengatakan tidak baik yaitu berjumlah 19 responden dan yang mengatakan sangat tidak sebanyak 7 orang. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diasumsikan bahwa kejelasan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan masih harus diperhatikan dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik dalam pelaksanaan kebijakan. Dapat diketahui kejelasan kebijakan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk

menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam kebijakan dimaksudkan agar penyampaian informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan implementor, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Berikut tanggapan responden mengenai indikator konsistensi.

Tabel 4.7
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Konsistensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.5	4.5	4.5
	2.00	21	31.3	31.3	35.8
	3.00	12	17.9	17.9	53.7
	4.00	20	29.9	29.9	83.6
	5.00	11	16.4	16.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

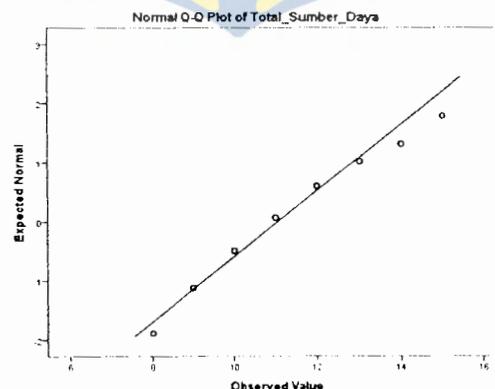
Dapat diketahui dari pemaparan tabel diatas mengenai konsistensi kebijakan dimana jawaban terbanyak yaitu tidak baik sebanyak 21 responden dan 3 orang responden yang mengatakan tidak baik. Konsistensi kebijakan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan dimana hal tersebut akan memberikan informasi yang penting bagi kelompok sasaran dan tidak berubah-ubah. Berdasarkan dari jawaban responden diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden mengatakan kebijakan masih belum konsisten hal ini seharusnya diperhatikan oleh pembuat kebijakan maupun implementor kebijakan dimana pentingnya konsistensi kebijakan sehingga tidak adanya informasi yang

berubah-ubah sehingga tujuan awal dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan formulasi dari pembuatan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal berikut dapat dilihat hasil pengujian normalitas data untuk dimensi sumber daya :

Gambar 4.2
Normalitas Data Dimensi Sumber Daya



Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 21

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dari grafik Q-Q Plot yang menunjukkan normalitas data dimensi sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Selanjutnya dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator dari dimensi sumber daya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu adanya pegawai yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan. Berikut tanggapan responden mengenai indikator konsistensi.

Tabel 4.8
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Sumber Daya Manusia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.0	3.0	3.0
	2.00	5	7.5	7.5	10.4
	3.00	22	32.8	32.8	43.3
	4.00	23	34.3	34.3	77.6
	5.00	15	22.4	22.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas dapat diketahui sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik hal ini dapat diketahui dengan jawaban terbanyak responden yaitu dengan jawaban baik sebanyak 23 responden dan 15 responden menjawab sangat baik. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia

yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

b. Finansial

Sumber daya finansial dalam penelitian ini merupakan adanya dana dalam menjalankan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Berikut tanggapan responden mengenai indikator finansial.

Tabel 4.9
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Finansial

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	11.9	11.9	11.9
	4.00	36	53.7	53.7	65.7
	5.00	23	34.3	34.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas dapat diketahui sumber daya finansial dalam menjalankan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik hal ini dapat diketahui dengan jawaban terbanyak responden yaitu dengan jawaban baik sebanyak 36 responden dan 23 responden menjawab sangat baik. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan jawaban dari responden dapat diketahui bahwa tersedianya sumber daya finansial yang baik dalam menjalankan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Mengingat masih banyanya masyarakat yang tidak mampu khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat maka memang sebaiknya tersedianya sumber dana yang cukup sehingga kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam menjalankan kebijakan, selain dana pendukung pelaksanaan kebijakan dapat diketahui juga bahwa pentingnya insentif yang diberikan kepada para implementor merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar para implementor atau pelaksana kebijakan dapat menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya dengan imbalan insentif yang sesuai dengan pekerjaannya

c. Metode

Metode dalam penelitian ini merupakan adanya cara yang ditempuh agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Berikut tanggapan responden mengenai indikator finansial.

Tabel 4.10
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Metode

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	11.9	11.9	11.9
	2.00	16	23.9	23.9	35.8
	3.00	11	16.4	16.4	52.2
	4.00	21	31.3	31.3	83.6
	5.00	11	16.4	16.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

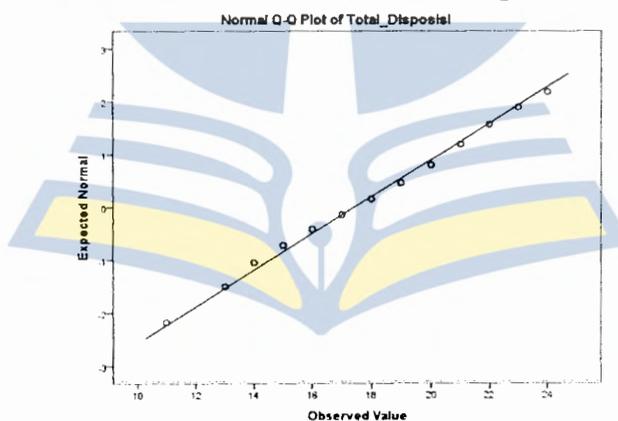
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui jawaban responden terbanyak yaitu jawaban baik dimana berjumlah 21 responden dan 11 responden yang menjawab sangat baik. Namun dapat dilihat juga masih banyak responden yang menjawab tidak baik yaitu berjumlah 16 orang responden dan 8 responden mengatakan sangat tidak baik. Hal ini tentunya dapat dianalisa adanya perbedaan pendapat antar responden dimana sebagian responden setuju dengan metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan sebagian lagi tidak setuju. Dapat dianalisa dalam penelitian ini perlu adanya perhatian terhadap cara yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan, hal ini dikarenakan agar tidak adanya lagi pro dan kontra terhadap metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Metode dalam menjalankan kebijakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Adanya metode yang baik akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan dari sikap pelaksana kebijakan dimana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dalam penelitian ini untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal berikut dapat dilihat hasil pengujian normalitas data untuk dimensi disposisi:

Gambar 4.3
Normalitas Data Dimensi Disposisi



Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 21

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dari grafik Q-Q Plot yang menunjukkan normalitas data dimensi disposisi. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Selanjutnya

dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator dari dimensi disposisi sebagai berikut :

a. Komitmen

Komitmen petugas/pelaksana dalam menjalankan kebijakan merupakan karakter yang harus dimiliki oleh implemtor kebijakan dimana para implementor harus memiliki komitmen kuat agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan. Berikut tanggapan responden mengenai indikator komitmen.

Tabel 4.11
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Komitmen

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.0	3.0	3.0
	2.00	17	25.4	25.4	28.4
	3.00	10	14.9	14.9	43.3
	4.00	21	31.3	31.3	74.6
	5.00	17	25.4	25.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban terbanyak responden dalam penelitian ini yaitu jawaban baik sebanyak 21 responden dan yang mengatakan sangat baik yaitu sebanyak 17 responden. Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas dapat dianalisa bahwa implementor kebijakan dalam hal ini Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan sudah memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan kebijakan. Adanya komitmen yang baik dalam

melaksanakan suatu kebijakan akan memberikan dampak baik agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan yang ditentukan. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat implementor selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

b. Kejujuran

Kejujuran implementor dalam melaksanakan kebijakan sangat penting untuk dimiliki agar kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan. Berikut tanggapan responden mengenai indikator kejujuran.

Tabel 4.12
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Kejujuran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	9	13.4	13.4	13.4
	2.00	23	34.3	34.3	47.8
	3.00	7	10.4	10.4	58.2
	4.00	22	32.8	32.8	91.0
	5.00	6	9.0	9.0	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban terbanyak responden dalam penelitian ini yaitu jawaban tidak baik sebanyak 23 responden dan yang mengatakan sangat tidak baik yaitu sebanyak 9 responden. Hal ini membuktikan bahwa kejujuran implementor dalam melaksanakan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat perlu memperhatikan kejujuran dalam melaksanakan kebijakan karena hal ini sangat penting bagi kelompok sasaran agar tidak adanya kecurangan dalam menjalankan kebijakan sehingga kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan dan sarannya.

c. Sifat Demokratis

Sifat demokratis yang dimiliki oleh implemmentor akan memberikan dampak baik tersendiri bagi kelompok sasaran. Berikut tanggapan responden mengenai indikator sifat demokratis.

Tabel 4.13
Frekwensi Jawaban Responden Sifat Demokratis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	7.5	7.5	7.5
	3.00	20	29.9	29.9	37.3
	4.00	18	26.9	26.9	64.2
	5.00	24	35.8	35.8	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata rata responden menjawab sangat baik yaitu sebanyak 24 responden dan yang menjawab baik

yaitu sebanyak 18 responden. Berdasarkan jawaban responden tersebut diatas dapat dianalisa bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan sudah demokratis sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

d. Komunikatif

Implementor dalam melaksanakan kebijakan harus bersikap komunikatif agar isi kebijakan seluruhnya dapat diketahui oleh kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat tidak mampu sehingga nantinya kebijakan dapat berjalan secara baik dan transparan dengan informasi yang disampaikan oleh implementor. Berikut tanggapan responden mengenai indikator sifat demokratis.

Tabel 4.14
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikatif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.5	1.5	1.5
	2.00	7	10.4	10.4	11.9
	3.00	11	16.4	16.4	28.4
	4.00	31	46.3	46.3	74.6
	5.00	17	25.4	25.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata rata responden menjawab baik yaitu sebanyak 31 responden dan yang menjawab sangat baik yaitu sebanyak 17 responden. Dalam menjalankan kebijakan implementor kebijakan sudah bersikap komunikatif sehingga nantinya dapat memberikan

dampak baik dalam menjalankan kebijakan Berdasarkan jawaban responden tersebut mengenai indikator komunikatif dapat dianalisa bahwa implementor dalam menjalankan kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan sudah komunikatif dalam menjalankan kebijakan.

e. Cerdik

Implementor dalam melaksanakan kebijakan harus bersikap cerdik, cerdik dalam hal ini yaitu dimana para implementor memiliki sikap bagaimana kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berikut tanggapan responden mengenai indikator sifat demokratis.

Tabel 4.15
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Indikator Cerdik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.0	3.0	3.0
	2.00	25	37.3	37.3	40.3
	3.00	5	7.5	7.5	47.8
	4.00	22	32.8	32.8	80.6
	5.00	13	19.4	19.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

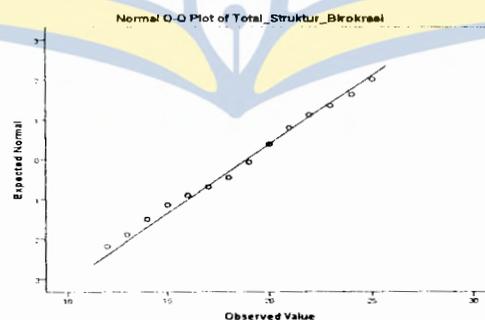
Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terbanyak yaitu yang mengatakan tidak baik yaitu berjumlah 25 responden hal tersebut membuktikan bahwa sifat cerdik belum sepenuhnya dimiliki oleh implementor dalam menjalankan kebijakan dimana upaya agar kebijakan dapat

mencapai tujuannya belum maksimal dimana dapat dilihat dari tanggapan responden diatas bahwa impelementor masih belum cerdas sepenuhnya dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Dalam penelitian ini untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal berikut dapat dilihat hasil pengujian normalitas data untuk dimensi struktur birokrasi:

Gambar 4.4
Normalitas Data Dimensi Struktur Birokrasi



Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 21

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dari grafik Q-Q Plot yang menunjukkan normalitas data dimensi struktur birokrasi. Dapat disimpulkan

bahwa data berdistribusi normal, karena terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Selanjutnya dapat dilihat tanggapan responden terhadap indikator dari dimensi struktur birokrasi sebagai berikut :

a. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan adanya pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan kebijakan sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik. Berikut tanggapan responden mengenai indikator sifat fragmentasi.

Tabel 4.16
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Indikator Fragmentasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	14.9	14.9	14.9
	4.00	31	46.3	46.3	61.2
	5.00	26	38.8	38.8	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terbanyak yaitu yang mengatakan baik yaitu berjumlah 31 responden dan yang mengatakan sangat baik yaitu berjumlah 26 responden. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa adanya pembagian tugas dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan dengan baik dan sehingga dapat dikatakan bahwa implementor kebijakan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

b. Standart Operasional Prosedur

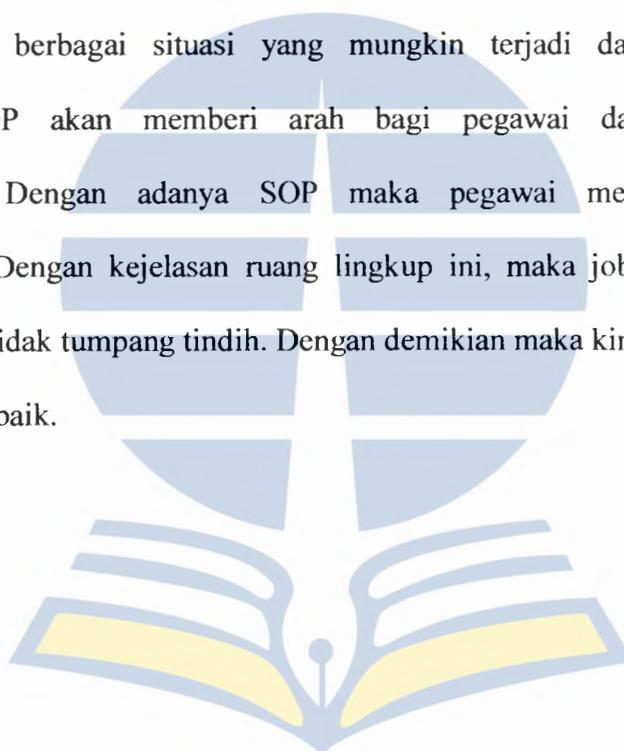
Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Standar Operating Prosedures (SOP) atau standar kerja dalam menjalankan kebijakan adalah tahapan yang dilakukan agar bagaimana kebijakan itu dapat berjalan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kebijakn tersebut. Berikut tanggapan responden mengenai indikator standar operasional prosedur.

Tabel 4.17
Frekwensi Jawaban Responden Mengenai Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.5	1.5	1.5
	2.00	3	4.5	4.5	6.0
	3.00	7	10.4	10.4	16.4
	4.00	27	40.3	40.3	56.7
	5.00	29	43.3	43.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2015

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden terbanyak yaitu yang mengatakan sangat baik yaitu berjumlah 29 responden dan yang mengatakan baik yaitu berjumlah 27 responden. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa adanya SOP dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Keberadaan SOP (Standard Operating Procedure) sangat penting bagi operasional suatu instansi. Dengan SOP kita bisa mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam menjalankan pekerjaan. SOP akan memberi arah bagi pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya SOP maka pegawai mengetahui lingkup pekerjaannya. Dengan kejelasan ruang lingkup ini, maka job description akan jelas sehingga tidak tumpang tindih. Dengan demikian maka kinerja pegawai akan terjaga dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik karena masih banyak hak yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Pada Dimensi Komunikasi ditemukan bahwa dalam transmisi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan jawaban responden dimana masih banyak responden yang mengatakan tidak baik. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diasumsikan bahwa belum semua masyarakat memahami tentang adanya program ini, sosialisasi serta penyuluhan juga masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Pada Dimensi Sumber daya diketahui bahwa pegawai yang menjalankan kebijakan ini secara umum sudah baik, dalam sumber daya finansial juga sudah di berikan oleh pemerintah, dana untuk melaksanakan program di kelurahan ini. Namun memang jika dilihat secara observasi banyak kegiatan dari program tersebut belum berjalan

sepenuhnya karena keterbatasan dana. Karena dana yang minim maka program ini tidak bisa sekaligus dilaksanakan, sehingga diselesaikan dengan beberapa tahapan.

3. Pada Dimensi Disposisi diketahui bahwa komitmen pegawai serta para petugas yang ada di lapangan sudah baik. Namun dari segi kejujuran menurut sebagian masyarakat masih perlu diperbaiki hal ini berkaitan dengan pendataan, karena program menjadi tidak tepat sasaran apabila pendataan tidak berjalan dengan jujur.
4. Pada dimensi struktur birokrasi diketahui bahwa pembagian tugas dalam kebijakan ini sudah jelas, ada pendamping kemudian pegawai khusus dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan ini, saat ini juga dalam pelaksanaannya para pegawai dan petugas lapangan mengacu pada SOP yang sudah ada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memahami tentang tujuan program ini
2. Sebaiknya ada pendanaan yang cukup dalam pelaksanaan program ini agar semua sasaran dari program P2KP di Kelurahan Tanjung Unggat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Sebaiknya ada pengawasan khusus dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan kemiskinan untuk meminimalisir permasalahan di lapangan.

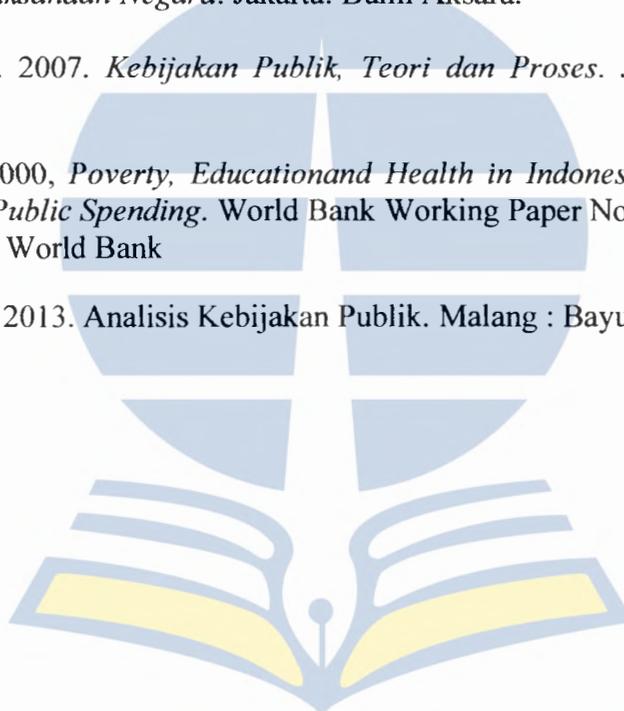
4. Seharusnya ada komitmen bagi seluruh implementor khususnya pemerintah daerah dan kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Unggat, dengan memberikan data terbaru masyarakat sehingga masyarakat yang mendapatkan lebih merata dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.
- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Ackerman F, Goodwin N.R, Dougherty L & Gallagher 2000, *The Political Economy of Inequality*, Island Press. Washington D.C.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha
- Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Subarsono, AG.2008. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan. Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Suharto , Edi.2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung.

- Suryawati, C. 2005. Memahami kemiskinan secara multidimensional. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005.
- Syafi'ie, 2006. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Syafarudin. 2008. *Efectivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Usman, Abdhul Aziiz. 2006. Identifikasi karakteristik rumah tangga miskin yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat. Tesis, MPKP UI
- Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- World Bank. 2000, *Poverty, Education and Health in Indonesia : Who Benefits from Public Spending*. World Bank Working Paper No 2739 Washington D C. : World Bank
- Widodo., Joko, 2013. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media



KUISIONER PENELITIAN

Data Responden

1. No. Responden :
2. N a m a :
3. Jenis Kelamin : Pria/ Wanita*
4. Umur : tahun
5. Satus : Kawin/ Belum Kawin*
6. Pendidikan Terakhir :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- Berilah pilihan jawaban anda atas pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda check list (√) terhadap jawaban yang dianggap paling tepat.
- Setiap jawaban atas pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban

I. Komunikasi

1. Adanya transmisi yaitu adanya saluran yang baik guna kelancaraan pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

2. Adanya kejelasan kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

3. Kebijakan yang disampaikan tidak pernah berubah-ubah

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

II. Sumber Daya

1. Adanya pegawai yang memiliki kemampuan untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

2. Tersedianya dana yang memadai dalam menjalankan kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

3. Pemerintah memiliki metode yang baik untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan P2KP

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

III. Disposisi

1. Pemerintah memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan P2KP

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

2. Pelaksana Kebijakan selalu bertindak jujur dalam pelaksanaan kebijakan P2KP

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

3. Pelaksana Kebijakan selalu bersifat demokratis dalam menjalankan kebijakan

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

4. Pelaksana Kebijakan selalu bersifat komunikatif dalam menjalankan kebijakan

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

5. Pelaksana Kebijakan selalu memiliki cara agar kebijakan P2KP dapat berjalan dengan baik

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

IV. Struktur Birokrasi

1. Adanya pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan kebijakan P2KP

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

2. Adanya Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan P2KP

Pilihan	Tanda (√)
Sangat setuju	
Setuju	
Ragu-ragu	
Tidak setuju	
Sangat tidak setuju	

Terima kasih

No	Komunikasi			Total	Sumber Daya			Total	Disposisi					Total	Struktur Birokrasi		Total
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	
1	5	4	5	14	3	4	5	12	5	5	4	5	4	23	4	5	9
2	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	20	4	4	8
3	4	3	3	10	4	4	2	10	4	4	3	5	4	20	4	4	8
4	4	2	2	8	4	4	1	9	4	4	5	4	5	22	5	5	10
5	5	4	5	14	5	5	3	13	5	4	5	5	5	24	5	5	10
6	3	4	3	10	3	5	3	11	3	2	3	3	4	15	3	3	6
7	3	4	2	9	2	3	4	9	3	3	4	5	3	18	3	5	8
8	4	4	3	11	4	4	2	10	3	4	3	4	4	18	4	4	8
9	5	2	5	12	5	5	4	14	5	2	5	5	5	22	5	5	10
10	3	4	3	10	3	3	5	11	3	5	2	5	5	20	4	4	8
11	4	3	1	8	4	5	4	13	5	4	4	4	4	21	4	4	8
12	5	2	2	9	3	5	2	10	5	2	5	5	5	22	5	5	10
13	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	3	3	3	17	3	3	6
14	3	3	2	8	3	3	2	8	4	3	3	3	3	16	3	3	6
15	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	3	4	4	18	4	5	9
16	5	2	3	10	5	5	1	11	5	2	5	4	2	18	5	5	10
17	5	4	5	14	3	5	5	13	2	2	5	5	5	19	5	5	10
18	5	5	2	12	5	5	5	15	5	2	5	4	2	18	5	5	10
19	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	2	4	2	16	4	4	8
20	4	2	4	10	4	4	1	9	2	1	4	4	4	15	4	4	8
21	5	5	4	14	3	5	2	10	5	1	4	5	1	16	5	4	9
22	5	5	2	12	5	5	4	14	4	1	5	5	5	20	5	5	10
23	5	2	5	12	5	5	1	11	5	4	5	5	2	21	5	5	10
24	4	4	4	12	3	5	3	11	2	1	5	4	4	16	5	5	10
25	4	1	4	9	3	4	3	10	4	4	3	4	2	17	4	5	9
26	5	4	1	10	5	4	1	10	5	5	5	4	2	21	4	5	9
27	5	5	2	12	3	5	2	10	5	1	4	5	5	20	4	4	8
28	5	1	2	8	2	5	5	12	2	2	3	5	2	14	5	5	10
29	5	1	5	11	5	5	2	12	5	2	5	5	2	19	5	3	8
30	4	5	2	11	4	3	3	10	1	4	3	4	2	14	5	4	9
31	3	3	3	9	3	3	3	9	3	5	3	3	2	16	3	3	6
32	3	1	3	7	3	4	1	8	2	2	3	4	2	13	4	4	8
33	4	3	2	9	4	4	2	10	4	4	3	4	2	17	4	4	8
34	4	4	4	12	4	4	1	9	4	1	4	4	4	17	4	4	8
35	5	2	5	12	5	5	4	14	2	1	5	4	2	14	4	5	9

No	Komunikasi			Total	Sumber Daya			Total	Disposisi					Total	Struktur Birokrasi		Total
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	
36	4	4	2	10	3	4	4	11	2	2	3	4	2	13	4	4	8
37	4	4	4	12	4	5	1	10	2	4	5	4	4	19	5	5	10
38	4	2	4	10	5	4	5	14	2	1	3	3	2	11	5	5	10
39	5	1	2	8	5	5	5	15	5	3	5	5	2	20	5	5	10
40	4	4	4	12	3	4	2	9	2	1	3	4	4	14	4	2	6
41	3	2	2	7	4	3	2	9	3	4	4	4	2	17	4	4	8
42	4	2	4	10	4	4	4	12	4	2	2	4	5	17	4	4	8
43	5	4	5	14	5	5	2	12	5	5	5	3	2	20	5	5	10
44	4	2	2	8	3	4	4	11	2	4	5	4	4	19	5	5	10
45	4	4	4	12	4	4	2	10	4	2	2	4	2	14	4	4	8
46	4	2	4	10	4	5	2	11	4	2	4	3	4	17	4	2	6
47	4	4	4	12	4	4	2	10	2	2	3	4	4	15	4	4	8
48	4	5	1	10	4	4	5	13	4	2	3	2	2	13	3	3	6
49	3	2	3	8	3	4	2	9	3	3	3	3	3	15	3	3	6
50	4	3	4	11	1	4	3	8	4	2	5	3	4	18	5	5	10
51	4	2	2	8	4	4	4	12	1	4	2	4	2	13	3	1	4
52	5	5	5	15	5	4	2	11	5	2	5	3	5	20	5	5	10
53	4	2	2	8	3	4	4	11	4	2	4	5	4	19	4	4	8
54	4	4	3	11	4	4	4	12	3	4	4	2	2	15	4	4	8
55	3	1	3	7	3	3	5	11	3	2	3	5	3	16	3	2	5
56	4	4	2	10	1	5	3	9	2	4	4	2	1	13	4	4	8
57	4	3	4	11	3	4	4	11	4	4	5	2	4	19	5	5	10
58	5	5	2	12	5	5	5	15	5	2	5	4	5	21	5	5	10
59	4	2	2	8	2	4	4	10	4	2	3	2	2	13	3	4	7
60	4	4	4	12	4	4	4	12	2	4	4	4	4	18	4	4	8
61	3	2	3	8	3	4	3	10	2	3	4	2	4	15	4	4	8
62	4	2	2	8	2	4	3	9	4	2	4	1	4	15	4	4	8
63	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	4	2	21	5	5	10
64	5	5	5	15	4	3	4	11	2	3	5	3	5	18	5	5	10
65	4	2	3	9	3	4	4	11	2	4	4	4	5	19	4	4	8
66	4	1	4	9	2	4	3	9	3	4	5	2	4	18	5	5	10
67	4	3	2	9	4	4	4	12	4	2	4	4	2	16	4	4	8

Frequencies

Frequency Table

Komunikasi_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	14.9	14.9	14.9
	4.00	36	53.7	53.7	68.7
	5.00	21	31.3	31.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Komunikasi_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	10.4	10.4	10.4
	2.00	19	28.4	28.4	38.8
	3.00	9	13.4	13.4	52.2
	4.00	22	32.8	32.8	85.1
	5.00	10	14.9	14.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Komunikasi_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.5	4.5	4.5
	2.00	21	31.3	31.3	35.8
	3.00	12	17.9	17.9	53.7
	4.00	20	29.9	29.9	83.6
	5.00	11	16.4	16.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber_Daya_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.0	3.0	3.0
	2.00	5	7.5	7.5	10.4
	3.00	22	32.8	32.8	43.3
	4.00	23	34.3	34.3	77.6
	5.00	15	22.4	22.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber_Daya_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	11.9	11.9	11.9
	4.00	36	53.7	53.7	65.7
	5.00	23	34.3	34.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Sumber_Daya_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	11.9	11.9	11.9
	2.00	16	23.9	23.9	35.8
	3.00	11	16.4	16.4	52.2
	4.00	21	31.3	31.3	83.6
	5.00	11	16.4	16.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Disposisi_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.0	3.0	3.0
	2.00	17	25.4	25.4	28.4
	3.00	10	14.9	14.9	43.3
	4.00	21	31.3	31.3	74.6
	5.00	17	25.4	25.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Disposisi_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	9	13.4	13.4	13.4
	2.00	23	34.3	34.3	47.8
	3.00	7	10.4	10.4	58.2
	4.00	22	32.8	32.8	91.0
	5.00	6	9.0	9.0	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Disposisi_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	7.5	7.5	7.5
	3.00	20	29.9	29.9	37.3
	4.00	18	26.9	26.9	64.2
	5.00	24	35.8	35.8	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Disposisi_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.5	1.5	1.5
	2.00	7	10.4	10.4	11.9
	3.00	11	16.4	16.4	28.4
	4.00	31	46.3	46.3	74.6
	5.00	17	25.4	25.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Disposisi_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.0	3.0	3.0
	2.00	25	37.3	37.3	40.3
	3.00	5	7.5	7.5	47.8
	4.00	22	32.8	32.8	80.6
	5.00	13	19.4	19.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Struktur_Birokrasi_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	14.9	14.9	14.9
	4.00	31	46.3	46.3	61.2
	5.00	26	38.8	38.8	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

Struktur_Birokrasi_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.5	1.5	1.5
	2.00	3	4.5	4.5	6.0
	3.00	7	10.4	10.4	16.4
	4.00	27	40.3	40.3	56.7
	5.00	29	43.3	43.3	100.0
Total		67	100.0	100.0	



CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Komunikasi_1 Komunikasi_2 Komunikasi_3 Total_Komunikasi
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations**Correlations**

		Komunikasi_1	Komunikasi_2	Komunikasi_3
Komunikasi_1	Pearson Correlation	1	.223	.278*
	Sig. (2-tailed)		.069	.023
	N	67	67	67
Komunikasi_2	Pearson Correlation	.223	1	.050
	Sig. (2-tailed)	.069		.690
	N	67	67	67
Komunikasi_3	Pearson Correlation	.278*	.050	1
	Sig. (2-tailed)	.023	.690	
	N	67	67	67
Total_Komunikasi	Pearson Correlation	.606**	.703**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	67	67	67

Correlations

		Total_Komunikasi
Komunikasi_1	Pearson Correlation	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Komunikasi_2	Pearson Correlation	.703**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Komunikasi_3	Pearson Correlation	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Total_Komunikasi	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	67

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Sumber_Daya_1 Sumber_Daya_2 Sumber_Daya_3 Total_Sumber_Daya
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Correlations

		Sumber_Daya_1	Sumber_Daya_2	Sumber_Daya_3
Sumber_Daya_1	Pearson Correlation	1	.282*	-.072
	Sig. (2-tailed)		.021	.562
	N	67	67	67
Sumber_Daya_2	Pearson Correlation	.282*	1	-.044
	Sig. (2-tailed)	.021		.721
	N	67	67	67
Sumber_Daya_3	Pearson Correlation	-.072	-.044	1
	Sig. (2-tailed)	.562	.721	
	N	67	67	67
Total_Sumber_Daya	Pearson Correlation	.611**	.487**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	67	67	67

Correlations

		Total_Sumber_Daya
Sumber_Daya_1	Pearson Correlation	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Sumber_Daya_2	Pearson Correlation	.487**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Sumber_Daya_3	Pearson Correlation	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	67
Total_Sumber_Daya	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	67

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Disposisi_1 Disposisi_2 Disposisi_3 Disposisi_4 Disposisi_5 Total_Disposisi
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Correlations

		Disposisi_1	Disposisi_2	Disposisi_3	Disposisi_4
Disposisi_1	Pearson Correlation	1	.045	.320**	.174
	Sig. (2-tailed)		.716	.008	.160
	N	67	67	67	67
Disposisi_2	Pearson Correlation	.045	1	-.032	-.088
	Sig. (2-tailed)	.716		.795	.478
	N	67	67	67	67
Disposisi_3	Pearson Correlation	.320**	-.032	1	.063
	Sig. (2-tailed)	.008	.795		.610
	N	67	67	67	67
Disposisi_4	Pearson Correlation	.174	-.088	.063	1
	Sig. (2-tailed)	.160	.478	.610	
	N	67	67	67	67
Disposisi_5	Pearson Correlation	.034	-.107	.233	.139
	Sig. (2-tailed)	.786	.389	.058	.263
	N	67	67	67	67
Total_Disposisi	Pearson Correlation	.622**	.368**	.582**	.455**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000
	N	67	67	67	67

Correlations

		Disposisi_5	Total_Disposisi
Disposisi_1	Pearson Correlation	.034	.622**
	Sig. (2-tailed)	.786	.000
	N	67	67
Disposisi_2	Pearson Correlation	-.107	.368**
	Sig. (2-tailed)	.389	.002
	N	67	67
Disposisi_3	Pearson Correlation	.233	.582**
	Sig. (2-tailed)	.058	.000
	N	67	67
Disposisi_4	Pearson Correlation	.139	.455**
	Sig. (2-tailed)	.263	.000
	N	67	67
Disposisi_5	Pearson Correlation	1	.524**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	67	67
Total_Disposisi	Pearson Correlation	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Struktur_Birokrasi_1 Struktur_Birokrasi_2 Total_Struktur_Birokra
si
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations



Correlations

		Struktur_Birokrasi_1	Struktur_Birokrasi_2	Total_Struktur_Birokrasi
Struktur_Birokrasi_1	Pearson Correlation	1	.690**	.896**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	67	67	67
Struktur_Birokrasi_2	Pearson Correlation	.690**	1	.940**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	67	67	67
Total_Struktur_Birokrasi	Pearson Correlation	.896**	.940**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Komunikasi_1 Komunikasi_2 Komunikasi_3 Total_Komunikasi
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	4

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Sumber_Daya_1 Sumber_Daya_2 Sumber_Daya_3 Total_Sumber_Daya
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.678	4

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Disposisi_1 Disposisi_2 Disposisi_3 Disposisi_4 Disposisi_5 Total_Disposisi
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.665	6

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Struktur_Birokrasi_1 Struktur_Birokrasi_2 Total_Struktur_Birokrasi
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

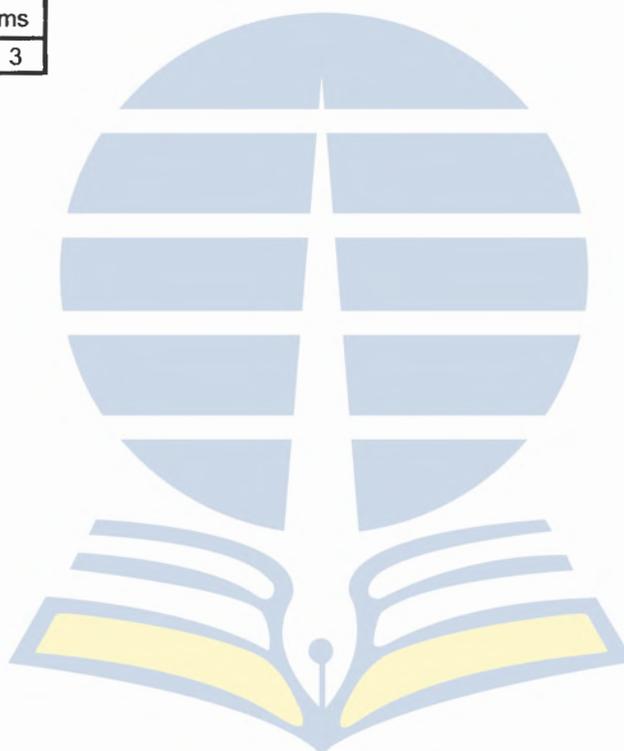
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.900	3



Explore

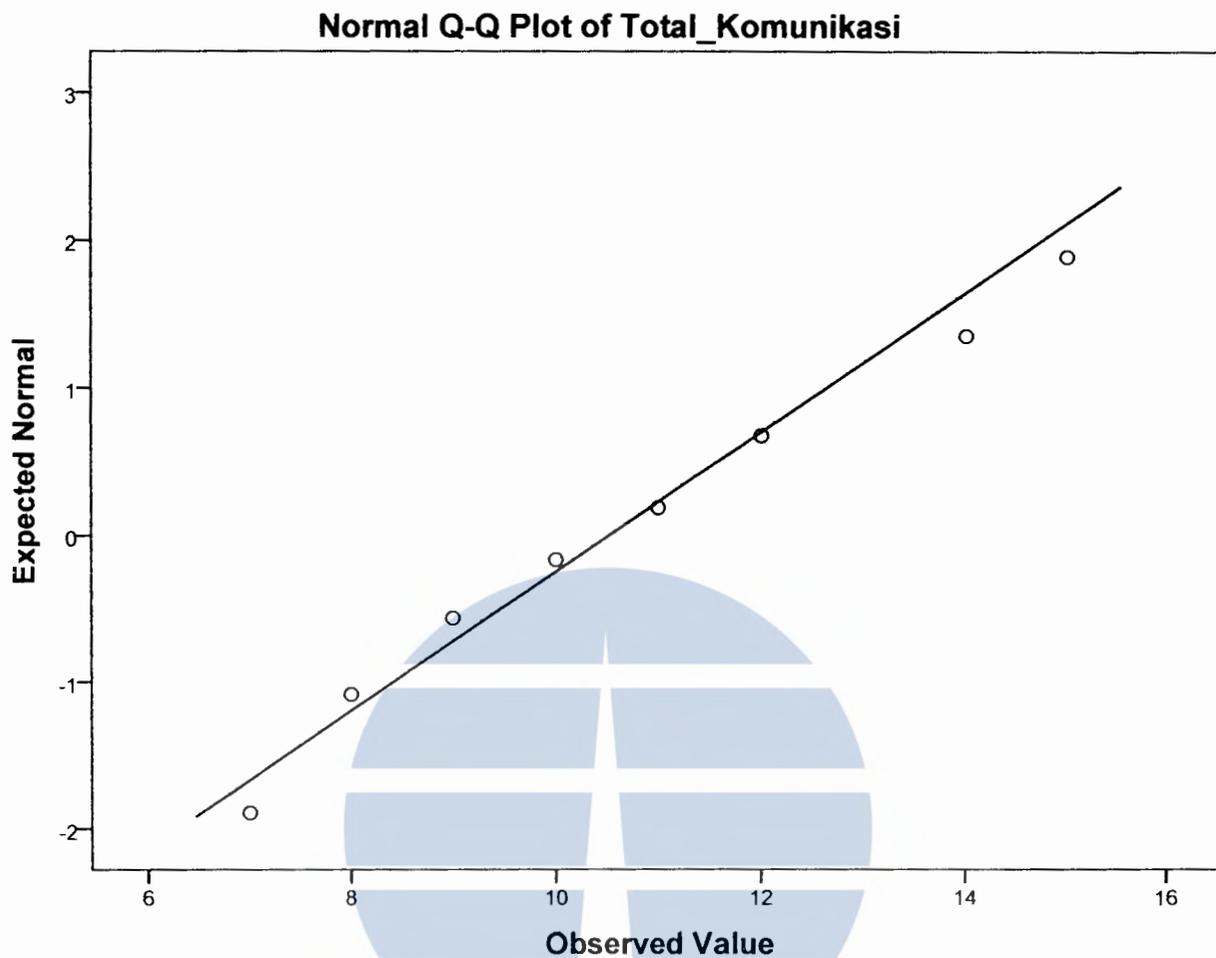
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total_Komunikasi	67	100.0%	0	0.0%	67	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Total_Komunikasi	Mean	10.5224	.25816
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 10.0070 Upper Bound 11.0378	
	5% Trimmed Mean	10.4693	
	Median	10.0000	
	Variance	4.465	
	Std. Deviation	2.11315	
	Minimum	7.00	
	Maximum	15.00	
	Range	8.00	
	Interquartile Range	3.00	
	Skewness	.301	.293
	Kurtosis	-.636	.578





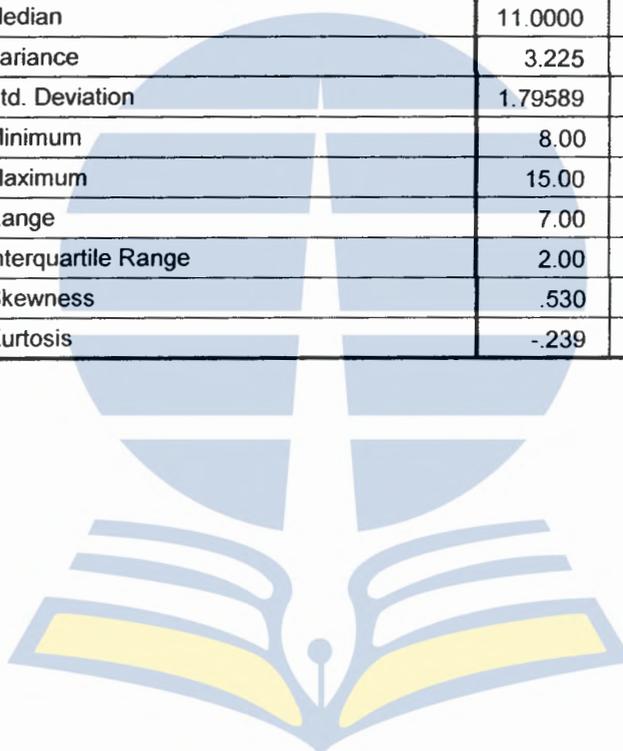
Explore

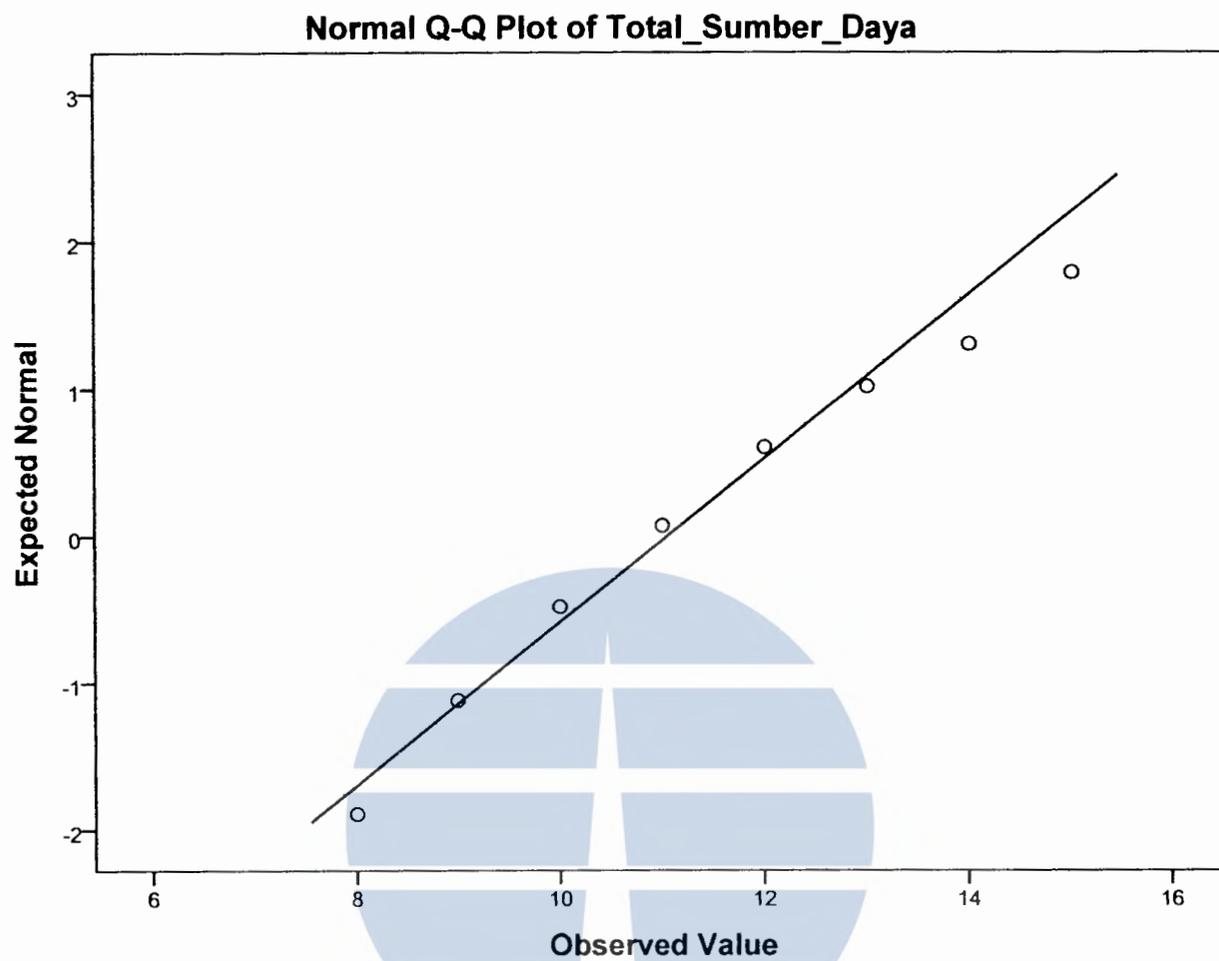
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total_Sumber_Daya	67	100.0%	0	0.0%	67	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Total_Sumber_Daya	Mean	11.0448	.21940
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 10.6067 Upper Bound 11.4828	
	5% Trimmed Mean	10.9884	
	Median	11.0000	
	Variance	3.225	
	Std. Deviation	1.79589	
	Minimum	8.00	
	Maximum	15.00	
	Range	7.00	
	Interquartile Range	2.00	
	Skewness	.530	.293
	Kurtosis	-.239	.578





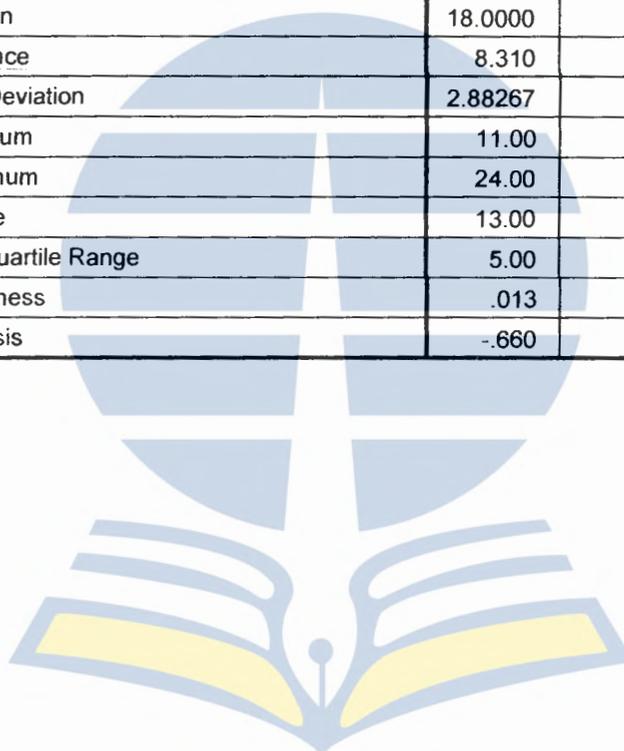
Explore

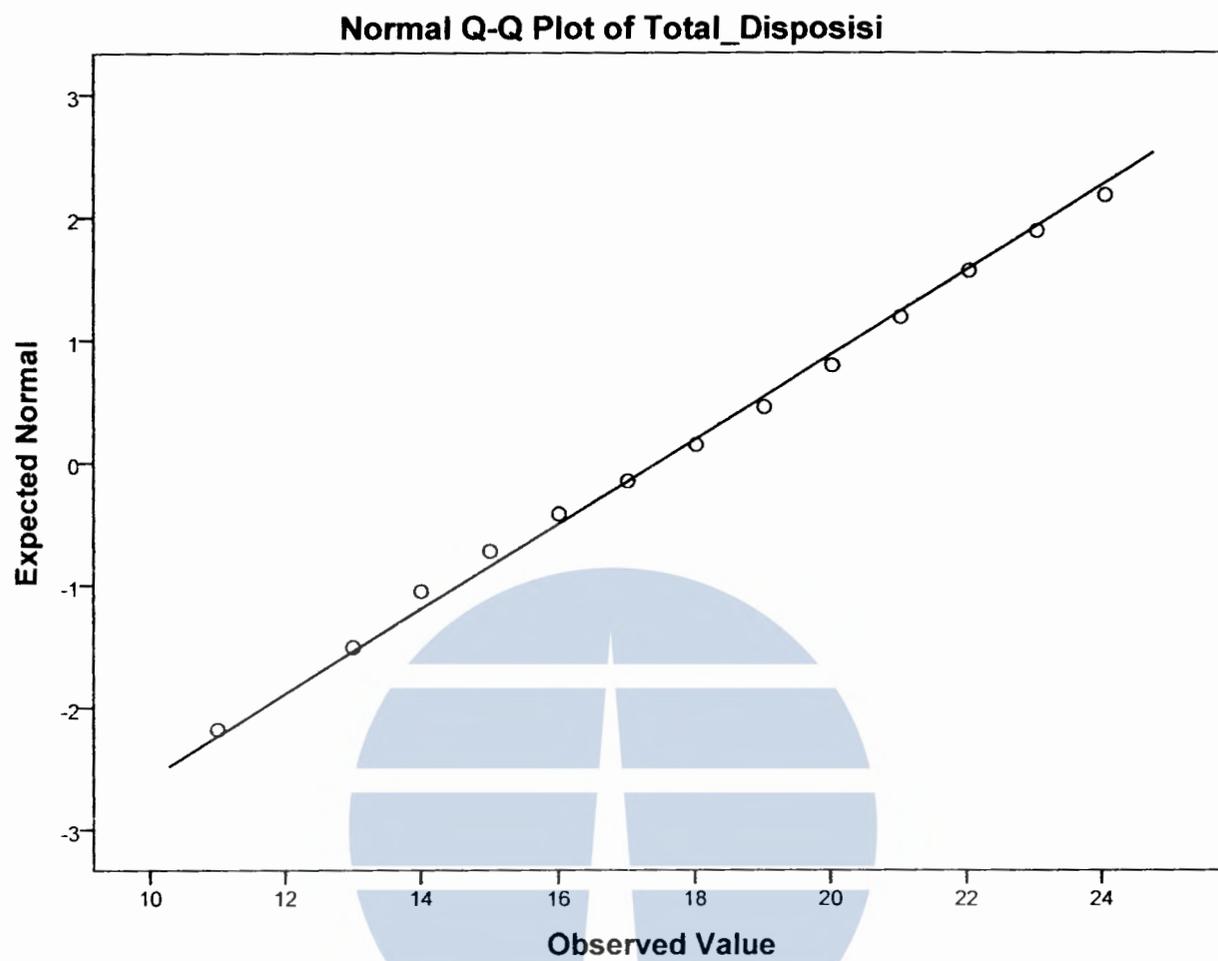
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total_Disposisi	67	100.0%	0	0.0%	67	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Total_Disposisi	Mean	17.4328	.35217
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 16.7297 Upper Bound 18.1360	
	5% Trimmed Mean	17.4088	
	Median	18.0000	
	Variance	8.310	
	Std. Deviation	2.88267	
	Minimum	11.00	
	Maximum	24.00	
	Range	13.00	
	Interquartile Range	5.00	
	Skewness	.013	.293
	Kurtosis	-.660	.578





Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Total_Struktur_Birokrasi	67	100.0%	0	0.0%	67	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Total_Struktur_Birokrasi	Mean	18.9104	.35186
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 18.2079 Upper Bound 19.6130	
	5% Trimmed Mean	18.9171	
	Median	19.0000	
	Variance	8.295	
	Std. Deviation	2.88008	
	Minimum	12.00	
	Maximum	25.00	
	Range	13.00	
	Interquartile Range	4.00	
	Skewness	-.186	.293
	Kurtosis	-.132	.578

